

## Peran Hukum Internasional Dalam Memerangi Terorisme

**Muhammad Rafi<sup>1</sup> Dikjaya<sup>2</sup> Darius Nayoltama<sup>3</sup> Lexi Valleno Havlenda<sup>4</sup>**

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>  
Email: [rafi@gmail.com](mailto:rafi@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Peran hukum internasional dalam memerangi terorisme sangat penting untuk menjamin perdamaian dan keamanan global. Hukum internasional memainkan peran penting dalam mengatur perbatasan nasional, hubungan diplomatik, perjanjian, dan penegakan, dengan tujuan mencapai perdamaian dan kemakmuran di antara bangsa-bangsa. Selain itu, hukum internasional memfasilitasi kerjasama antara negara-negara di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Dengan menangani kepentingan bersama dan mempromosikan ketertiban dan keadilan, hukum internasional berkontribusi untuk meningkatkan kerjasama dan koeksistensi damai antara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Penegakan hukum internasional oleh badan hukum dan praktisi hukum pada skala internasional sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan dan memastikan kesadaran tentang norma-norma hukum internasional, sehingga meningkatkan keamanan dan stabilitas global.

**Kata Kunci:** Hukum Internasional, Terorisme, Perdamaian, Keamanan, Kerjasama Internasional, Penegakan Hukum

### Abstact

*The role of international law in the fight against terrorism is crucial inining global peace and security. International law plays an important role in regulating national borders, diplomatic relations, treaty making, and enforcement, with the aim of achieving peace and prosperity among nations. In addition, international law facilitates cooperation between states in various areas such as economic, social, cultural, legal, defence, and security. By addressing common interests and promoting order and justice, international law contributes to enhancing cooperation and peaceful coexistence among nations throughout the world. International law enforcement by legal bodies and legal practitioners on an international scale is essential to resolving disputes and ensuring awareness of the norms of international law, thereby enhancing global security and stability.*

**Keywords:** International Law, Terrorism, Peace, Security, International Cooperation, Law Enforcement



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Sejak abad ke-20, terorisme telah menjadi perhatian global. Serangan teroris telah terjadi di banyak negara di dunia, seringkali dengan konsekuensi yang mengerikan. Serangan teroris seperti pemboman, penyerangan, dan serangan dunia maya telah menyebabkan banyak korban jiwa, kekayaan, dan stabilitas sosial. Awalnya, perang melawan terorisme bergantung pada hukum nasional masing-masing negara. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan jumlah ancaman teroris, diperlukan pendekatan yang terkoordinasi dan terkoordinasi di tingkat internasional. Di sinilah peran hukum internasional menjadi semakin penting. Selama beberapa dekade terakhir, komunitas internasional telah menanggapi tantangan terorisme dengan mengembangkan kerangka hukum internasional. Instrumen-instrumen ini mencakup konvensi, perjanjian, standar dan resolusi PBB yang berupaya memberikan kerangka hukum yang jelas dan kuat untuk memerangi terorisme secara efektif. Salah satu peristiwa terpenting dalam perkembangan hukum internasional terkait terorisme adalah serangan 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat. Serangan tersebut memicu respons global yang kuat dan

mendorong komunitas internasional untuk meningkatkan kerja sama dalam memerangi terorisme. Pada tahun-tahun berikutnya, PBB dan organisasi regional lainnya mengadopsi berbagai instrumen hukum untuk mengatasi ancaman terorisme secara efektif. Selain upaya legislatif, hukum internasional telah menjadi dasar kerja sama internasional dalam penegakan hukum, kejahatan, penuntutan teroris lintas batas dan penyitaan aset teroris. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, namun juga sebagai alat penting dalam membentuk respons kolektif terhadap terorisme. Meskipun demikian, tantangan terorisme masih kompleks dan beragam, dan upaya untuk memberantasnya terus dilakukan. Perkembangan teknologi, kejahatan dunia maya, dan ketidakstabilan politik di beberapa belahan dunia menambah sulitnya melawan ancaman ini. Oleh karena itu, komitmen yang kuat dari semua negara tetap diperlukan untuk memperkuat sistem hukum internasional dan memperkuat hubungan antar negara dalam memerangi terorisme secara efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>1</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Metode riset yang dilakukan dalam pemecahan permasalahan yang terjadi, analisis penelitian normatif sifatnya preskriptif dimana dapat memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kejahatan Terorisme sebagai Kejahatan Internasional**

Ketika melihat lanskap global saat ini, satu tantangan terbesar yang dihadapi komunitas internasional adalah kejahatan terorisme. Kejahatan ini telah menyebabkan kerugian besar tidak hanya dalam hal kehilangan nyawa, tetapi juga dalam merusak ketenteraman dan kestabilan dunia. Dalam upaya untuk memahami dan mengatasi fenomena ini, adalah penting untuk memperdalam pemahaman tentang definisi, dampak, serta upaya-upaya hukum dan diplomatik yang telah dilakukan untuk mengatasi terorisme.

### **Definisi dan Konteks Hukum Internasional Mengenai Terorisme**

Dalam konteks hukum internasional, kejahatan terorisme menjadi sebuah fenomena yang kompleks dan mendesak yang membutuhkan perhatian serius dari komunitas internasional. Definisi kejahatan terorisme mencakup beragam aspek, mulai dari motif dan tujuan para pelaku hingga dampaknya terhadap masyarakat global.<sup>2</sup> Dalam mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kejahatan terorisme, adalah penting untuk mengeksplorasi konteks hukum internasional yang melingkupinya. Pertama, perlu dipahami bahwa terorisme bukanlah fenomena yang terisolasi dalam suatu negara. Sebaliknya, terorisme sering kali memiliki dimensi transnasional yang melibatkan individu atau kelompok yang beroperasi di berbagai negara. Pelaku teroris cenderung melintasi batas negara dan menjalin jaringan yang kompleks di beberapa wilayah, menghasilkan tantangan bagi penegakan hukum dan keamanan di tingkat internasional. Dalam kerangka hukum internasional, terorisme sering diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional karena sifatnya yang melintasi batas negara. Ini menempatkan tanggung jawab pada negara-negara untuk bekerja sama dalam mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme secara efektif. Kerjasama internasional menjadi kunci dalam menghadapi

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

<sup>2</sup> (Rahmatullah, 2022)

tantangan ini, dengan pertukaran informasi, koordinasi tindakan penegakan hukum, dan pengembangan strategi bersama menjadi elemen penting dalam menangani terorisme.

Selain itu, kejahatan terorisme juga menjadi fokus perhatian global karena dampaknya yang luas terhadap perdamaian, stabilitas, dan keamanan masyarakat. Serangan teroris sering kali menyebabkan kerugian yang besar, baik dalam hal korban jiwa maupun kerusakan fisik dan psikologis. Oleh karena itu, kejahatan terorisme dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan global yang memerlukan tanggapan yang kuat dan terkoordinasi dari komunitas internasional. Dalam upaya untuk menanggulangi terorisme, peran hukum internasional menjadi sangat penting. Berbagai instrumen hukum internasional, seperti konvensi, protokol, dan perjanjian antar-negara, telah dirancang untuk memperkuat kerangka hukum dalam melawan terorisme. Ini termasuk upaya untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi tindakan terorisme, serta untuk menegakkan hukuman yang sesuai terhadap para pelaku. Dengan demikian, dalam memahami dan mengatasi kejahatan terorisme, adalah penting untuk mengakui konteks hukum internasional yang melingkupinya. Dengan kerjasama internasional yang kuat dan komitmen untuk memperkuat kerangka hukum internasional, komunitas internasional dapat lebih efektif dalam menanggulangi ancaman terorisme dan menjaga perdamaian serta keamanan global.

### **Dampak Terjadinya Terorisme**

Dampak terorisme terhadap hubungan internasional tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga merambah ke bidang politik, diplomatik, dan sosial. Fenomena ini telah menyebabkan konsekuensi yang kompleks dan sering kali menantang bagi negara-negara yang berusaha menangani ancaman terorisme. Terorisme telah menyebabkan konflik yurisdiksi yang kompleks antara negara-negara. Karena pelaku terorisme sering melintasi batas negara dan beroperasi di beberapa wilayah, penegakan hukum terhadap terorisme sering kali melibatkan kerja sama antar negara. Namun, perbedaan dalam sistem hukum, kebijakan, dan prosedur hukum membuat kerjasama ini menjadi sulit dilakukan. Konflik yurisdiksi juga dapat muncul ketika negara-negara berusaha untuk mengekstradisi terduga pelaku terorisme antara satu sama lain, dengan pertimbangan politik dan hukum yang rumit. Selain itu, terorisme juga dapat mempengaruhi hubungan politik antara negara-negara. Serangan teroris yang melibatkan warga negara atau kelompok yang beroperasi dari suatu negara dapat menyebabkan ketegangan politik antara negara tersebut dan negara-negara lainnya. Misalnya, serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat memicu reaksi politik yang kuat dari pemerintah AS dan berdampak pada hubungan diplomatik dengan beberapa negara di seluruh dunia.<sup>3</sup> Hal ini dapat mengakibatkan pergeseran dalam kebijakan luar negeri, peningkatan keamanan, dan peningkatan kerjasama dalam bidang intelijen dan penegakan hukum.

Dampak terorisme juga dirasakan dalam arena diplomatik. Serangan teroris dapat memicu reaksi diplomatik yang luas, termasuk pembekuan hubungan diplomatik, penarikan duta besar, atau sanksi internasional terhadap negara-negara yang diduga memberikan dukungan kepada kelompok teroris. Hal ini dapat mengganggu stabilitas regional dan mempersulit upaya untuk mencapai kerjasama internasional dalam menangani masalah keamanan global. Selain dampak politik dan diplomatik, terorisme juga dapat memiliki dampak sosial yang signifikan. Serangan teroris yang menargetkan kelompok tertentu berdasarkan agama, etnis, atau keyakinan dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan sosial dan diskriminasi. Hal ini dapat mengancam kerukunan sosial dan merusak struktur masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, dampak terorisme terhadap hubungan internasional sangat kompleks dan meluas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama yang kuat

---

<sup>3</sup> (Sardarizadeh, 2021)

antara negara-negara, koordinasi tindakan penegakan hukum yang efektif, dan upaya untuk mempromosikan dialog dan pemahaman antar bangsa. Hanya dengan kerjasama dan koordinasi yang kokoh, komunitas internasional dapat menghadapi ancaman terorisme secara efektif dan memperkuat perdamaian serta keamanan global.

### **Peran Hukum Internasional dalam Penanganan Terorisme**

Peran hukum internasional dalam menangani terorisme sangat penting dan mencakup berbagai aspek yang meliputi pencegahan, penegakan hukum, dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan terorisme. Salah satu contoh utama dari bagaimana hukum internasional terlibat dalam penanganan terorisme adalah peran International Criminal Court (ICC). ICC didirikan melalui Statuta Roma pada tahun 1998 dengan tujuan untuk mengejar individu yang melakukan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Meskipun terorisme tidak secara eksplisit disebutkan dalam Statuta Roma, kejahatan terorisme dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang mungkin masuk dalam yurisdiksi ICC.<sup>4</sup> Dalam prakteknya, terorisme sering kali melibatkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, seperti pembunuhan massal, penyiksaan, atau penggunaan kekerasan yang meluas terhadap warga sipil. Ketika terorisme mencapai ambang kejahatan terhadap kemanusiaan, ICC memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Pentingnya pengakuan terhadap terorisme sebagai kejahatan yang dapat diperiksa oleh ICC adalah bahwa hal ini menempatkan tanggung jawab pada negara-negara untuk mengekstradisi atau memperadilkan pelaku terorisme yang berada di bawah yurisdiksi mereka sendiri. Jika negara-negara gagal untuk mengekstradisi atau mengadili pelaku terorisme, maka ICC dapat bertindak sebagai pengadilan internasional yang independen untuk menegakkan keadilan dan menjamin bahwa para pelaku kejahatan terorisme dihukum sesuai dengan hukum internasional. Namun, penting untuk diingat bahwa ICC memiliki keterbatasan dalam menangani terorisme. ICC hanya memiliki yurisdiksi atas negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, dan banyak negara yang belum melakukannya. Selain itu, ICC hanya dapat menangani kasus terorisme yang memenuhi syarat sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah definisi Statuta Roma, yang membatasi lingkup tindakan terorisme yang dapat dituntut oleh pengadilan. Selain peran ICC, hukum internasional juga memainkan peran dalam mendukung kerjasama internasional dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Berbagai instrumen hukum internasional telah dirancang untuk memfasilitasi pertukaran informasi, kerja sama intelijen, dan koordinasi penegakan hukum antar negara dalam upaya untuk menghadapi ancaman terorisme secara efektif. Dengan demikian, peran hukum internasional dalam penanganan terorisme melibatkan berbagai aspek yang meliputi pengadilan individu yang terlibat dalam kejahatan terorisme, mendukung kerjasama internasional dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, dan memastikan bahwa negara-negara bertanggung jawab untuk mengekstradisi atau mengadili pelaku terorisme di bawah yurisdiksi mereka sendiri.

### **Tantangan dan Strategi dalam Penanganan Teorirsme**

Penanganan terorisme merupakan sebuah tantangan yang sangat kompleks dan sering kali menuntut strategi yang lebih dari sekadar pendekatan hukum yang kuat. Walaupun penegakan hukum yang efektif adalah salah satu aspek penting dalam melawan terorisme, pendekatan yang komprehensif juga harus mencakup strategi pencegahan, rehabilitasi, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan sipil.<sup>5</sup> Pencegahan terorisme

<sup>4</sup> (Renata Christa Auli, 2023)

<sup>5</sup> (Komisis Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2018)

tidak hanya mencakup deteksi dan penghentian rencana serangan, tetapi juga mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas terorisme. Ini termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang radikalisme, pendidikan yang mempromosikan toleransi dan pluralisme, serta pembangunan sosial ekonomi yang memperbaiki ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mungkin menjadi pemicu bagi terorisme. Penegakan hukum tetap menjadi aspek penting dalam menghadapi ancaman terorisme. Ini melibatkan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi intelijen, penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku terorisme, serta penguatan kapasitas penegakan hukum dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks dari terorisme modern, termasuk penggunaan teknologi digital dan media sosial untuk merekrut dan mempengaruhi individu.

Namun, dalam menangani terorisme, sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak melanggar hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Terorisme sering kali digunakan sebagai alasan untuk mengorbankan kebebasan individu dan memperkuat kontrol pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang seimbang antara keamanan dan hak-hak individu, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Selain pendekatan pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan HAM, strategi dalam penanganan terorisme juga harus mencakup upaya rehabilitasi terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas terorisme atau radikalisme. Pendekatan rehabilitasi ini melibatkan reintegrasi individu ke dalam masyarakat dengan memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan kerja, dukungan psikologis, dan pembimbingan yang diperlukan untuk membantu mereka meninggalkan ideologi ekstremis dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dengan demikian, pendekatan yang komprehensif dalam penanganan terorisme membutuhkan strategi yang meliputi pencegahan, penegakan hukum, perlindungan HAM, dan rehabilitasi. Hanya dengan menggabungkan berbagai aspek ini, kita dapat lebih efektif dalam melawan terorisme sambil memastikan kebebasan, keadilan, dan kedamaian di seluruh dunia.

## **KESIMPULAN**

Kejahatan terorisme telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam konteks hukum internasional dan keamanan global. Dengan definisi yang mengacu pada tindakan kekerasan yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, atau sosial, terorisme telah menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas dunia. Dalam kajian hukum internasional, terorisme dianggap sebagai kejahatan internasional karena melibatkan individu atau kelompok dengan jaringan transnasional yang melintasi batas Negara. Dampak terorisme terhadap hubungan internasional tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga merambah ke bidang politik, diplomatik, dan sosial. Serangan terorisme telah memicu konflik yurisdiksi yang kompleks antara negara-negara, menghadirkan tantangan hukum, politik, dan diplomatik dalam penegakan hukum terhadap terorisme. Namun, pengakuan terorisme sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global telah memperkuat kesadaran akan perlunya kerja sama internasional dalam menangani ancaman ini. Peran hukum internasional dalam penanganan terorisme sangatlah penting. Melalui mekanisme hukum internasional seperti International Criminal Court (ICC), negara-negara memiliki alat untuk mengekstradisi, menuntut, dan mengadili pelaku terorisme di bawah yurisdiksi mereka sendiri. Selain itu, kerja sama internasional dalam bidang pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi juga menjadi kunci dalam memerangi terorisme secara efektif. Namun, tantangan dan kompleksitas dalam penanganan terorisme tidak bisa diabaikan. Penanganan terorisme memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif yang mencakup pencegahan,

penegakan hukum, perlindungan HAM, dan rehabilitasi. Hanya dengan kerja sama internasional yang kuat, serta strategi yang terkoordinasi dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum internasional, kita dapat berhasil mengatasi ancaman terorisme dan menjaga perdamaian serta keamanan global.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Komisis Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan . (2018, Mei 17). Retrieved from Kontras: <https://kontras.org/2018/05/17/siaran-pers-bersama-perangi-terorisme-dengan-menyeluruh-dan-bermartabat/>
- Marzuki, P. M. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Rahmatullah. (2022). Kejahatan Terorisme Sebagai Extraordinary Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis.
- Renata Christa Auli, S. (2023, September 5). International Criminal Court. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--ini-pengertian-dan-yurisdiksinya-cl4380/>
- Sardarizadeh, S. (2021, September 10). BBC News Indonesia. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58512075>